

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pendanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. Di Sumatera Barat, PAD mempunyai peranan penting dalam mendukung otonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi besaran PAD, yang perlu dianalisis untuk memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi PAD di Sumatera Barat pada tahun 2020-2024 sangat relevan mengingat kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti kebijakan fiskal, potensi sumber daya alam, dan perkembangan sektor ekonomi lokal. Dalam konteks ini, pajak daerah sebagai salah satu komponen utama PAD memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh (Iqbal, 2023) menunjukkan bahwa pajak daerah berfungsi sebagai penyumbang terbesar dalam PAD. Namun, meskipun kontribusinya besar, pertumbuhan pajak daerah masih cenderung lambat, yang mengindikasikan perlunya upaya lebih untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Peningkatan kepatuhan ini sangat penting karena akan berdampak langsung pada realisasi PAD yang diharapkan.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dikenakan atas wilayah tertentu dan ditanggung oleh individu atau badan hukum. Pajak ini dipungut berdasarkan hukum tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk memenuhi

kebutuhan lokal dengan tujuan utama memaksimalkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, meskipun kontribusinya yang signifikan, pertumbuhan penerimaan pajak daerah cenderung lambat dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, karena penerimaan pajak yang stagnan dapat menghambat pelaksanaan program-program pembangunan yang vital bagi masyarakat. Wahyuni dan Arief (2020) mengungkapkan bahwa "pajak daerah sebagai penyumbang terbesar dalam komponen PAD secara tidak langsung dapat mempengaruhi juga pada realisasi penerimaan PAD." Dengan kata lain, jika pertumbuhan pajak daerah tidak ditingkatkan, maka akan ada dampak negatif terhadap total PAD yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program sosial lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi yang efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah agar dapat lebih optimal dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah sangat berpengaruh terhadap perolehan pajak tersebut. Dalam konteks teori kepatuhan, dijelaskan bahwa kepatuhan menentukan apakah individu atau badan telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, semakin besar pula potensi penerimaan pajak daerah yang dapat diperoleh oleh pemerintah. Kepatuhan pajak tidak hanya

mencerminkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab mereka, tetapi juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem perpajakan yang ada. Ketika masyarakat merasa bahwa pajak yang mereka bayar digunakan secara transparan dan efektif untuk pembangunan daerah, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, jika terdapat ketidakpuasan atau ketidakpercayaan terhadap pengelolaan pajak, tingkat kepatuhan dapat menurun, yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada penerimaan pajak daerah.

Selain pajak daerah, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan lainnya juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah. Pajak daerah merupakan imbalan atas pelayanan atau kuasa tertentu yang secara tegas diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan. Hal ini berbeda dengan pajak, di mana pihak yang membayar retribusi menerima imbalan langsung dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, sanksi yang dikenakan pada pajak bersifat ekonomi; artinya, jika individu atau badan tidak membayar pajak, mereka tidak akan mendapatkan manfaat dari layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Melalui edukasi dan sosialisasi yang efektif, pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam membayar pajak daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan PAD dan mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pajak daerah merupakan komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Namun, pertumbuhan pajak daerah cenderung

lambat akibat berbagai kendala yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang dampak positif yang dapat ditimbulkan dari pembayaran pajak terhadap peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan publik. Ketidapahaman ini dapat mengakibatkan masyarakat merasa bahwa kewajiban perpajakan mereka tidak memiliki relevansi langsung dengan kesejahteraan mereka. Misalnya, jika masyarakat tidak menyadari bahwa pajak yang mereka bayar digunakan untuk membangun jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan, mereka mungkin tidak merasa termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dan efektif, menjelaskan bagaimana pajak berkontribusi pada pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga perlu menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung hasil dari pembayaran pajak mereka. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak, diharapkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak daerah dapat meningkat. Hal ini tidak hanya akan berdampak positif pada penerimaan pajak daerah, tetapi juga akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan rasa saling percaya yang esensial untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, sistem pemungutan pajak yang belum sepenuhnya efisien dan transparan juga menjadi faktor penghambat, di mana proses administrasi yang

rumit dan birokratis dapat membuat masyarakat merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sehingga menimbulkan rasa skeptis dan enggan untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan. Di sisi lain, pengelolaan retribusi daerah yang kurang efisien juga berkontribusi terhadap penurunan PAD, di mana banyak potensi retribusi yang seharusnya dapat diperoleh dari layanan publik, seperti parkir, izin usaha, dan layanan lainnya, tidak dapat dimaksimalkan karena adanya birokrasi yang rumit, kurangnya inovasi dalam penetapan tarif yang sesuai dengan kondisi pasar, serta minimnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, yang semuanya berujung pada hilangnya pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh. Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset daerah lainnya seperti tanah dan bangunan, belum dikelola secara optimal untuk meningkatkan PAD, di mana banyak BUMD yang tidak beroperasi secara efisien atau bahkan mengalami kerugian, serta kurangnya strategi yang jelas dalam memanfaatkan aset-aset daerah untuk menghasilkan pendapatan, sehingga potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkontribusi pada peningkatan PAD. Terakhir, pendapatan lain-lain yang sah juga berkontribusi terhadap PAD, tetapi sering kali tidak terkelola dengan baik, di mana banyak pendapatan yang berasal dari sumber-sumber seperti hibah, sumbangan, dan pendapatan dari kegiatan ekonomi lainnya tidak tercatat dengan baik dalam laporan keuangan daerah, serta kurangnya perhatian dalam pengembangan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan ini, sehingga kontribusinya terhadap PAD menjadi tidak signifikan dan tidak dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan yang stabil. Dengan demikian, semua faktor ini saling

terkait dan mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, di mana diperlukan upaya kolaboratif dan inovatif dari semua pihak untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Selain pajak, retribusi daerah juga memegang peranan penting dalam mendukung PAD. Pengelolaan retribusi daerah yang efektif dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Dengan strategi yang tepat, pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi retribusi ini untuk mendukung pembangunan daerah. Di samping itu, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti pendapatan yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), juga merupakan sumber pendapatan yang perlu dioptimalkan. Penelitian oleh Mulyani dan Ramdini (2021) menekankan bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang baik dapat meningkatkan PAD secara substansial, mengingat bahwa aset-aset daerah memiliki potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang ada, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan analisis mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi PAD. Dengan memahami pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan dan mendukung pembangunan daerah yang lebih baik, serta kemandirian finansial pemerintah daerah. Dengan upaya yang terencana dan sistematis, diharapkan PAD dapat berfungsi sebagai pendorong utama dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Menurut Mardiasmo (2012) dalam penelitian Suprpto dan Purbowati (2024) Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa PAD tidak hanya berfungsi sebagai indikator finansial, tetapi juga sebagai refleksi dari potensi yang ada di suatu daerah. Menegaskan bahwa optimalisasi PAD sangat penting untuk mendukung proses pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dengan memiliki PAD yang kuat, pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam melaksanakan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PAD, pertumbuhannya masih cenderung lambat (Hutagalung, 2023). Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan sumber pendapatan tersebut, termasuk rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan, sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang ada dan mencapai kemandirian finansial yang diharapkan. Dengan demikian, analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PAD menjadi sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna meningkatkan kontribusi pajak dan retribusi di masa depan.

Pajak daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berarti bahwa peningkatan penerimaan pajak dapat langsung memperkuat kondisi keuangan daerah. Di sisi lain, retribusi daerah dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak menunjukkan pengaruh yang serupa, menunjukkan bahwa kedua sumber pendapatan ini masih memerlukan pengelolaan yang lebih baik. Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif terhadap pajak dan retribusi tidak hanya akan meningkatkan PAD, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Ini sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan layanan publik di daerah, penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak dan retribusi masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kondisi ini menunjukkan pentingnya strategi yang lebih terfokus dalam menggali potensi ekonomi lokal serta pembenahan sistem administrasi keuangan daerah.

Dalam sistem desentralisasi yang dianut oleh Indonesia, pemerintah daerah diberikan kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya dan keuangan daerah. Desentralisasi ini bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan, mempercepat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam konteks ini, kemampuan fiskal daerah menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu tolok ukur dari kemandirian fiskal tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni seluruh pendapatan yang berasal dari sumber daya ekonomi lokal yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Komponen PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD memiliki peran strategis sebagai sumber pendanaan utama yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, dan

kegiatan pemerintahan lainnya tanpa harus terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (Halim & Nasir, 2006, dalam Kireina & Octaviani, 2021).

Meskipun kerangka desentralisasi telah memberikan ruang dan peluang besar bagi pemerintah daerah, pada kenyataannya banyak daerah di Indonesia masih belum mampu mengoptimalkan potensi PAD secara maksimal. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, terbatasnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah, serta lemahnya inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru. Sebagai akibatnya, ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, khususnya dalam bentuk dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), masih sangat tinggi. Ketergantungan ini menjadi hambatan bagi daerah untuk berkembang secara mandiri dan menghambat fleksibilitas dalam pengambilan keputusan fiskal yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Padahal, salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah menciptakan daerah yang berdaya secara ekonomi dan mampu melayani masyarakatnya secara efektif (Kireina & Octaviani, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Sumatra Barat pada tahun 2020–2024, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Penekanan pada perlunya upaya strategis dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting untuk mencapai kemandirian finansial pemerintah daerah, di mana dengan mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang inovatif serta sistem pengelolaan yang efisien, pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi sumber pendapatan yang ada,

seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, sehingga tidak hanya mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, tetapi juga menciptakan stabilitas keuangan yang lebih baik dalam jangka panjang, yang pada gilirannya akan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang lebih ambisius dan berkelanjutan. Upaya strategis ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam mengelola dan memungut pajak, yang dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pengembangan sistem informasi yang transparan dan akuntabel untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan. Selain itu, inovasi dalam menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan, seperti pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pada potensi lokal dan investasi dalam infrastruktur yang dapat menarik minat investor, juga menjadi bagian integral dari strategi ini, di mana dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, pemerintah daerah tidak hanya dapat meningkatkan PAD, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, melalui pendekatan yang terencana dan terintegrasi, diharapkan pemerintah daerah dapat mencapai kemandirian finansial yang lebih kuat, yang pada gilirannya akan mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Sumatra Barat Tahun 2020 - 2024 ”. Kareana penerimaan daerah perlu terus diupayakan dengan peningkatan adanyapenggalian potensi sumber-sumber dana yang ada sehingga dapat potensi sumber-sumber dana yang ada menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya. Upaya perbaikan sangat diperlukan terutama di bidang pengelolaan keuangan daerah. Berbagai kebijakan tentang keuangan daerah diarahkan agar daerah memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuannya dalam membiayai penyelenggaraan urusannya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan diberikannya kewenangan oleh pemerintah pusat berupa kewenangan yang kuat, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional. Untuk mempercepat tercapainya kemandirian khususnya perusahaan-perusahaan swasta diharapkan kontribusinya dalam sumber lain-lain PAD yang sah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Sumatra Barat Tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Sumatra Barat Tahun 2020-2024?

3. Bagaimana pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Sumatra Barat Tahun 2020-2024?
4. Bagaimana pengaruh pendapatan lain-lain yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Sumatra Barat Tahun 2020-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas maka tujuan penulis melakukan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Sumatra Barat Tahun 2020-2024?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Sumatra Barat Tahun 2020-2024?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Sumatra Barat Tahun 2020-2024?
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh pendapatan lain-lain yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Sumatra Barat Tahun 2020-2024?

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka beberapa kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengaruh berbagai sumber pendapatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Sumatra Barat, khususnya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan literatur dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah, dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan pengelolaan PAD di Sumatra Barat.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai optimalisasi PAD di daerah otonom lainnya, serta memberikan panduan untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan berkelanjutan.

2. Manfaat Bagi Perusahaan

- a. Penelitian ini membantu merancang kebijakan untuk meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi, serta mengurangi ketergantungan pada dana pusat.
- b. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi penghindaran pajak, menciptakan sistem pemungutan yang lebih efisien.

- c. Dengan PAD yang optimal, pemerintah daerah dapat membiayai pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor penting, seperti pendidikan dan kesehatan.
- d. Peningkatan PAD dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
- e. Penelitian ini membantu pemerintah merumuskan kebijakan berbasis data untuk memaksimalkan potensi PAD, meningkatkan pengelolaan keuangan daerah

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan hasil penelitian ini agar lebih mudah dipahami, maka dalam penyusunan hasil penelitian ini menggunakan sistematika penelitian yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab I pada penelitian ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematis penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II pada penelitian ini menjelaskan landasan teori yang berisikan dasar teoritis, penelitian terdahulu yang akan di gunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis, kerangka dan hipotesis penelitian

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab III pada penelitian ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data identifikasi dan pengukuran variable variable penelitian serta metode analisi data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV pada penelitian ini menjelaskan tentang hasil pengujian penelitian yang di lakukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang di ajukan.

BAB V: PENUTUP

Bab V pada penelitian ini mejelaskan tentang kesimpulan dan saran yang akan di berikan oleh peneliti baik penelitian selanjutnya.